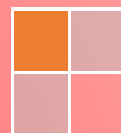




# **RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERUBAHAN 2018 - 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA**



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi yang tercantum pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, maka disusunlah Rencana Strategi yang mampu menerjemahkan tugas dan fungsi dimaksud.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.

Tondano,

2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,**



**Dra. MARTHA M. AGUW**

Pembina Tkt. I IV/b

NIP. 196805011997032009

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

## 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP****LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap kejumudan sistem sentralistik yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber- sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah money follow functions, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber - sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber- sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber- sumber pendapat asli daerahnya dari komponenkomponen pajak dan retribusi daerah.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (regulerend), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat.

Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai – nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa baru saja dilakukan penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa, maka seluruh Renstra Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu 3 disesuaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Perubahan Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan serta adanya perubahan kebijakan strategis nasional. Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian

sasaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa harus 4 memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Perubahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa perlu disempurnakan atau ditajamkan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang penetapan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RAPBD.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah agar :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pajak daerah;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; (Goals)
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa depan;
5. Keterkaitan antar komponen Renstra Badan dan antara komponen Renstra Badan dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Minahasa menjadi jelas dan tidak bias.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Lainnya
- 2.4 Penentuan Isu-isu Strategis Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Minahasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa serta Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Bidang Pengawasan dan Pelaporan (bagan terlampir).

##### **2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program Badan yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- d. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2.2 SUMBERDAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebanyak 59 orang, terdiri dari 27 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 32 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), yang menurut golongannya terbagi dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

| No | Kedudukan dalam Organisasi       | Komposisi Pegawai |           |        |
|----|----------------------------------|-------------------|-----------|--------|
|    |                                  | Laki-Laki         | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Kepala Badan                     | 1                 | -         | 1      |
| 2. | Sekretaris                       | 1                 | -         | 1      |
|    | a. Kasubag Umum dan Perlengkapan | -                 | 1         | 1      |
|    | Staf Pendukung :                 |                   |           |        |
|    | - Aparatur Sipil Negara          | -                 | 1         | 1      |
|    | - PTT                            | 4                 | 5         | 9      |

|    |   |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
|    | b. Kasubag Keuangan dan Aset<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT                                  | 1<br>1<br>- | -<br>4<br>4 | 1<br>5<br>4 |
|    | c. Kasubag Kepegawaian<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT  | -<br>-<br>3 | 1<br>-<br>6 | 1<br>-<br>9 |
| 3. | Bidang PBB-P2 dan BPHTB   | 1           | -           | 1           |
|    | a. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT                     | 1<br>-<br>1 | -<br>-<br>2 | 1<br>-<br>3 |
|    | b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT                        | 1<br>-<br>3 | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>3 |
|    | c. Seksi Penagihan<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT  | 1<br>-<br>- | -<br>-<br>3 | 1<br>-<br>3 |
| 4. | Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan   | -           | 1           | 1           |
|    | a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT | 1<br>-<br>2 | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>2 |

|    |   |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
|    | b. Seksi Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT | 1<br>-<br>- | -<br>-<br>1 | 1<br>-<br>1 |
|    | c. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT       | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>1 | 1<br>-<br>1 |
| 5. | Bidang Penagihan  | 1           | -           | 1           |
|    | a. Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT             | -<br>-<br>2 | 1<br>-<br>1 | 1<br>-<br>3 |
|    | b. Seksi Penagihan Retribusi Daerah<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT                 | 1<br>-<br>1 | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>1 |
|    | c. Seksi Keberatan dan Banding<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT                      | 1<br>-<br>1 | -<br>-<br>1 | 1<br>-<br>2 |
| 6. | Bidang Pengawasan dan Pelaporan   | 1           | -           | 1           |
|    | a. Seksi Pelaporan Pajak Daerah Lainnya<br>Staf Pendukung :<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- PTT             | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>1 | 1<br>-<br>1 |

|              |                                  |           |           |           |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| b.           | Seksi Pelaporan Retribusi Daerah | 1         | -         | 1         |
|              | Staf Pendukung :                 |           |           |           |
|              | - Aparatur Sipil Negara          | -         | -         | -         |
|              | - PTT                            | -         | 1         | 1         |
| c.           | Seksi Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB | 1         | -         | 1         |
|              | Staf Pendukung :                 |           |           |           |
|              | - Aparatur Sipil Negara          | -         | -         | -         |
|              | - PTT                            | 1         | -         | 1         |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>35</b> | <b>36</b> | <b>71</b> |

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

| Status Kepegawaian / Pangkat    | Golongan / Ruang     | Kaban    | Unit Kerja di Lingkungan BPP-Retda |                 |            |                  |                               |   |
|---------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------------|---|
|                                 |                      |          | Sekretariat                        | Bidang PBB/PHTB | Bidang PPP | Bidang Penagihan | Bidang Pengawasan & Pelaporan |   |
| <b>A. Aparatur Sipil Negara</b> |                      |          |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| 1                               | Pembina Utama Muda   | IV/c     | 1                                  |                 |            |                  |                               |   |
| 2                               | Pembina Tkt. I       | IV/b     |                                    | 1               |            |                  |                               |   |
| 3                               | Pembina              | IV/a     |                                    | 1               | 1          | 1                | 1                             |   |
| 4                               | Penata Tkt. I        | III/d    |                                    | 2               | 2          | 1                | 2                             |   |
| 5                               | Penata               | III/c    |                                    | 1               | 1          | 1                | 0                             |   |
| 6                               | Penata Muda Tkt. I   | III/b    |                                    | 4               |            |                  |                               |   |
| 7                               | Penata Muda          | III/a    |                                    | 1               |            |                  |                               |   |
| 8                               | Pengatur Tkt. I      | II/d     |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| 9                               | Pengatur             | II/c     |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| 10                              | Pengatur Muda Tkt. I | II/b     |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| 11                              | Penata Muda          | II/a     |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| 12                              | Juru Tkt I           | I/d      |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| 13                              | Juru                 | I/c      |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| 14                              | Juru Muda Tkt. I     | I/b      |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| 15                              | Juru Muda            | I/a      |                                    |                 |            |                  |                               |   |
| <b>B. PTT</b>                   |                      |          |                                    | 9               | 10         | 10               | 10                            | 8 |
| <b>JUMLAH</b>                   |                      | <b>1</b> | <b>19</b>                          | <b>14</b>       | <b>12</b>  | <b>13</b>        | <b>11</b>                     |   |



### 2.2.2 PERLENGKAPAN

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Gedung Kantor

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Terletak di Jln. Maesa Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa diatas lahan seluas ± M<sup>2</sup>. Rasio antara jumlah bidang dan jumlah ASN sebanyak 59 dengan luas bangunan (kantor) tidak ideal.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 3 buah dan roda 2 sebanyak 24 buah, seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama operasional terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar laik jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas dinas, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (computer dan laptop) untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih baik, namun kapasitas dan performanya sudah ketinggalan, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menjang fungsi dari komputer yang lama tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran

pekerjaan. Alat Perforasi sebanyak 3 buah, 2 buah dalam keadaan rusak.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa yang melingkupi fungsi pengelolaan Pajak Daerah maka peran BPP-Retda sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas tersebut.

Saat ini terdapat 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaaan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

| No | Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun |                |                |                |                 | Realisasi Capaian Tahun |                |      |      |      | Rasio Capaian (%) pada Tahun |       |      |      |      |
|----|--|------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|------|------|------|------------------------------|-------|------|------|------|
|    |  |            |            |                          | 2019                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023            | 2019                    | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                         | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | 2  | 3          | 4          | 5                        | 6                         | 7              | 8              | 9              | 10              | 11                      | 12             | 13   | 14   | 15   | 16                           | 17    | 18   | 19   | 20   |
| 1  | Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah      |            |            |                          | 39.171.000.000            | 33.283.100.000 | 37.093.181.000 | 38.391.442.000 | 39.735.1421.000 | 40.130.380.250          | 32.137.794.451 |      |      |      | 102.45                       | 96.56 |      |      |      |
| 2  | Prosentase Peningkatan Pajak Daerah            |            |            |                          | 11%                       | 2%             | 2.5%           | 3%             | 3.5%            | 11.69%                  | 0%             |      |      |      | 11.69                        | 0%    |      |      |      |

Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 s/d 2023

| Program/Kegiatan  | Anggaran pada Tahun   |                       |                       |      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun |                      |      |      |      | Rasio dan realisasi dan anggaran Tahun |              |      |      |      | Rata-rata pertumbuhan |           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|-------------------------------|----------------------|------|------|------|--|--------------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022 | 2023 | 2019                          | 2020                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                                   | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran              | Realisasi |
| 1   | 2                     | 3                     | 4                     | 5    | 6    | 7                             | 8                    | 9    | 10   | 11   | 12                                     | 13           | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        |
| <b>URUSAN PENUNJANG</b>   | <b>16.914.645.546</b> | <b>12.462.757.200</b> | <b>17.056.747.652</b> |      |      |                               |                      |      |      |      |  |              |      |      |      |                       |           |
| <b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                            | <b>11.262.005.000</b> | <b>10.100.920.200</b> |                       |      |      | <b>10.969.733.201</b>         | <b>9.976.378.660</b> |      |      |      | <b>97,41</b>                           | <b>97,26</b> |      |      |      |                       |           |
| Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran                              | 11.262.005.000        | 10.100.920.200        |                       |      |      | 10.969.733.201                | 9.976.378.660        |      |      |      | 97,41                                  | 97,26        |      |      |      |                       |           |
| <b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                    | <b>1.166.120.000</b>  | <b>261.460.100</b>    |                       |      |      | <b>701.305.579</b>            | <b>256.648.358</b>   |      |      |      | <b>70,76</b>                           | <b>97,86</b> |      |      |      |                       |           |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional   | 240.000.000           |                       |                       |      |      | 233.000.000                   |                      |      |      |      | 97,42                                  | 97,26        |      |      |      |                       |           |
| Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor                              | 516.000.000           | 41.000.000            |                       |      |      | 148.970.000                   | 39.875.000           |      |      |      | 28,87                                  | 96,42        |      |      |      |                       |           |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          | 211.900.800           | 99.951.600            |                       |      |      | 120.607.579                   | 96.373.358           |      |      |      | 56,92                                  | 99,91        |      |      |      |                       |           |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor   | 198.219.200           | 120.508.500           |                       |      |      | 197.928.000                   | 120.400.000          |      |      |      | 99,85                                  |              |      |      |      |                       |           |
| <b>III. Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                       | <b>108.000.000</b>    |                       |                       |      |      | <b>105.073.100</b>            | -                    |      |      |      | <b>97,34</b>                           |              |      |      |      |                       |           |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                 |                       |                       |                       |      |      |                               |                      |      |      |      |  |              |      |      |      |                       |           |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan  | 48.000.000            |                       |                       |      |      | 46.922.700                    |                      |      |      |      | 97,76                                  |              |      |      |      |                       |           |
| Pengadaan pakaian KORPRI  |                       |                       |                       |      |      |                               |                      |      |      |      |  |              |      |      |      |                       |           |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                     | 60.000.000            |                       |                       |      |      | 58.150.400                    |                      |      |      |      | 96,92                                  |              |      |      |      |                       |           |
| <b>IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>     | <b>4.378.520.546</b>  | <b>2.100.376.900</b>  |                       |      |      | <b>3.974.000.423</b>          | <b>2.080.815.510</b> |      |      |      | <b>93,57</b>                           | <b>95,34</b> |      |      |      |                       |           |
| Penyusunan sistem pengelolaan keuangan daerah                                   |                       |                       |                       |      |      |                               |                      |      |      |      |  |              |      |      |      |                       |           |
| Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah |                       |                       |                       |      |      |                               |                      |      |      |      |  |              |      |      |      |                       |           |
| Sosialisasi paket regulasi tentang  | 983.903.500           | 26.603.500            |                       |      |      | 962.683.940                   | 26.501.700           |      |      |      | 97,84                                  | 99,62        |      |      |      |                       |           |

|  |               |               |  |  |  |               |               |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| pengelolaan keuangan daerah  |               |               |  |  |  |               |               |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah |               |               |  |  |  |               |               |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daera                  | 2.715.832.546 | 1.993.688.400 |  |  |  | 2.359.951.003 | 1.984.766.490 |  |  |  | 86.90 | 99.55 |  |  |  |  |  |
| Pendataan dan Penilaian PBB  | 678.784.500   |               |  |  |  | 651.365.480   | 69.547.320    |  |  |  | 95.96 | 86.84 |  |  |  |  |  |
| Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah               |               | 80.085.000    |  |  |  |               |               |  |  |  |       |       |  |  |  |  |  |

## REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2016 – 2020 KABUPATEN MINAHASA

| No.          | JENIS PAJAK     | TARGET                |                       |               |                       |                       |               |                       |                       |               |                       |                       |               |                       |                       |              |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              |                 | 2016                  |                       |               | 2017                  |                       |               | 2018                  |                       |               | 2019                  |                       |               | 2020                  |                       |              |
|              |                 | Target                | Realisasi             | %             | Target                | Realisasi             | %             | Target                | Realisasi             | %             | Target                | Realisasi             | %             | Target                | Realisasi             | %            |
| 1            | Pajak Hotel     | 2.978.900.000         | 3.887.276.856         | 130,49        | 3.500.000.000         | 4.851.220.772         | 138,61        | 4.050.000.000         | 5.434.621.978         | 134,19        | 5.500.000.000         | 6.586.177.706         | 119,45        | 4.014.500.000         | 3.343.462.839         | 83,28        |
| 2            | Pajak Restoran  | 1.954.250.000         | 1.929.320.371         | 98,72         | 2.000.000.000         | 2.143.963.959         | 107,20        | 3.500.000.000         | 3.964.511.201         | 113,27        | 4.650.000.000         | 4.375.467.246         | 94,10         | 3.255.000.000         | 2.554.460.189         | 78,48        |
| 3            | Pajak Hiburan   | 8.000.000             | 8.103.500             | 101,29        | 8.000.000             | 8.152.364             | 101,90        | 8.000.000             | 8.500.000             | 106,25        | 15.000.000            | 27.250.000            | 181,67        | 5.600.000             | 7.895.000             | 140,98       |
| 4            | Pajak Reklame   | 743.750.000           | 964.186.307           | 129,64        | 900.000.000           | 947.743.999           | 105,30        | 900.000.000           | 1.130.372.238         | 125,60        | 916.000.000           | 1.168.293.873         | 127,54        | 665.000.000           | 863.457.756           | 129,84       |
| 5            | PPJ             | 7.300.000.000         | 8.348.320.695         | 114,36        | 8.250.000.000         | 9.559.122.948         | 115,87        | 10.000.000.000        | 10.493.630.401        | 104,94        | 10.500.000.000        | 11.502.481.550        | 109,55        | 9.600.000.000         | 10.603.111.011        | 110,45       |
| 6            | Pajak MBLB      | 4.000.000.000         | 4.584.743.400         | 114,62        | 4.250.000.000         | 4.322.630.282         | 101,71        | 5.000.000.000         | 2.942.524.200         | 58,67         | 4.000.000.000         | 2.560.545.094         | 64,01         | 3.150.000.000         | 1.326.798.295         | 42,12        |
| 7            | Pajak Air Tanah | 50.000.000            | 56.454.500            | 112,91        | 50.000.000            | 54.853.000            | 109,71        | 50.000.000            | 50.130.300            | 100,26        | 60.000.000            | 72.530.690            | 120,88        | 42.000.000            | 243.342.910           | 579,39       |
| 8            | Pajak SBW       | 25.000.000            | 0,00                  | 0,00          | 25.000.000            | 28.600.000            | 114,40        | 25.000.000            | 25.000.000            | 100,00        | 30.000.000            | 30.100.000            | 100,33        | 21.000.000            | 10.500.000            | 50           |
| 9            | PBB-P2          | 5.300.000.000         | 3.768.913.615         | 71,11         | 5.300.000.000         | 4.247.597.780         | 80,14         | 5.300.000.000         | 4.303.427.444         | 81,20         | 5.300.000.000         | 5.249.922.249         | 99,06         | 3.710.000.000         | 4.686.662.433         | 126,33       |
| 10           | BPHTB           | 3.530.000.000         | 5.114.811.235         | 144,90        | 5.000.000.000         | 11.500.920.918        | 230,02        | 10.000.000.000        | 12.601.710.667        | 126,02        | 8.200.000.000         | 8.557.611.842         | 104,3         | 8.820.000.000         | 8.498.104.018         | 96,35        |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>24.114.442.449</b> | <b>28.662.130.479</b> | <b>110,71</b> | <b>29.283.000.000</b> | <b>37.664.806.022</b> | <b>128,62</b> | <b>38.833.000.000</b> | <b>40.954.428.429</b> | <b>105,46</b> | <b>39.171.000.000</b> | <b>40.130.380.250</b> | <b>102,45</b> | <b>33.283.100.000</b> | <b>32.137.794.451</b> | <b>96,56</b> |

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Sistem informasi yang semakin tidak bisa dibendung menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengoptimalkan pelayanan baik itu untuk konsultasi perpajakan daerah, pengaduan, bahkan informasi-informasi lainnya terkait dengan Pajak Daerah. Pemahaman masyarakat mengenai Pajak Daerah dan manfaatnya adalah hal utama yang ingin ditransfer BPP-Retda Kabupaten Minahasa agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya terhadap perpajakan terutama Pajak Daerah.

Macam pelayanan, diversifikasi pemungutan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tentunya memiliki arahan sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yakni pemungutan Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah selama lima tahun terakhir (2013-2018) maka telah banyak capaian kemajuan dalam menunjang kelembagaan Badan Pendapatan Daerah, namun tentu besaran kebutuhan layanan kedepan akan semakin meningkat seiring dengan penguatan secara berkelanjutan kelembagaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa poin yang menjadi tantangan dan peluang merupakan pemicu untuk meningkatkan kinerja layanan terutama agar manfaatnya lebih dapat diterima secara luas bagi masyarakat Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

### 1. Penguatan Regulasi Pajak Daerah

Menyesuaikan kebutuhan dan dinamika yang ada, telah diusulkan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dalam Prolegda.

### 2. Pembayaran Pajak PBB-P2 melalui Bank Sulut Go atm (BSGatm)

Diletakkan pada semangat layanan berbasis IT, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan pelaporan pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah serta optimalisasi pajak

daerah. Bekerjasama dengan Bank SulutGo pembayaran Pajak PBB-P2 dapat melalui atm Bank Sulut Go.

3. Tax Banking (pembayaran pajak melalui transfer bank)

Untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak dan meminimalisir transaksi manual konvensional, melalui transfer dana perbankan.

4. Kerjasama pemberitaan dengan Media Massa

Sarana efektif untuk sosialisasi tentang kebijakan, regulasi dan strategi perpajakan daerah melalui media cetak.

5. Penataan System Kerja dan Pelayanan Perpajakan

Dilakukan reformasi birokrasi internal Dinas Pendapatan Daerah, rotasi personel dan penugasan.

6. Sosialisasi tentang regulasi perpajakan daerah secara berkelanjutan

Dilakukan sosialisasi regulasi perpajakan daerah kepada masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sadar dan taat akan pajak.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka dapat kami identifikasikan sebagai berikut :

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.
2. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual.
3. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada.
4. Penetapan NJOP PBB-P2 yang masih jauh dibawah harga pasar.
5. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus ditingkatkan.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Minahasa harus dicapai pada tahun 2023. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Minahasa ini 2018-2023 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 adalah

:

**“MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT,  
ADIL DAN SEJAHTERA”**

#### **RUMUSAN MISI**

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
3. Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

5. Memantapkan manajemen birokrasi yang Profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Nawa Cita RR-RD yaitu :

1. Menghadirkan Pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara.
2. Membuat Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya.
3. Membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah perdesaan Minahasa.
4. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera.
7. Membentuk karakter masyarakat Minahasa, dengan memperkuat semangat Mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou.
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social dengan menciptakan ruang dialog antar warga.
9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sesuai RPJMD Tahun 2018 – 2023 bahwa Misi Untuk Badan Pendapatan Daerah adalah Misi 5, yaitu : “Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dengan tujuan Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang, dan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Dari rumusan Visi dan Misi yang diangkat dari visi, misi dan Nawa Cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan menjadi rumusan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 tentu hal ini tidak implementatif pada semua SKPD terutama pada Badan Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu penggunaan bahasa yang bersayap juga menimbulkan makna ganda sehingga untuk mengimplementasikan Misi yang ada menjadi kurang fokus dan bisa menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran yang diinginkan.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi perhatian atas penyusunan Renstra SKPD lainnya. Hal ini tidak lepas dari adanya ketentuan SPM yang harus dipenuhi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Untuk telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tidak termasuk perangkat daerah yang merencanakan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Minahasa, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap BPP-Retda adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah;
4. Penataan kelembagaan yang mengacu pada pelayanan prima.
5. Penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah standar;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak;
7. Penegakkan hukum yang belum optimal.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Ke-5 RPJMD 2018 – 2023, dengan tujuan ke-2 yaitu meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang serta sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas, yaitu;

#### Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

| NO. | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN  | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE |      |      |      |      | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|-----|---|--|---|---|---|------|------|------|------|--|
|     |   |  |   |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)   | (5)                                     | (6)   | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)                                     |
| 1.  | <i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</i> |  | <i>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja</i>                                 | C                                       | CC  | B    | BB   | BB   | BB   | BB                                       |
|     |   | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat daerah | Nilai IKM Perangkat Daerah  | 3                                       | 3   | 3    | 3    | 4    | 4    | 4  |
| 2.  | <i>Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah</i>  |  | <i>Prosentase Peningkatan Pajak Daerah</i>                                  | 12%                                     | 11%   | 2%   | 2,5% | 3%   | 3.5% | 22%                                      |
|     |   | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah   | 1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah                                | 100%                                    | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
|     |   |  | 2. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD | ≥0                                      | ≥0  | ≥0   | ≥0   | ≥0   | ≥0   | ≥0                                       |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa diuraikan dalam kebijakan, program dan kegiatan yaitu "Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah".

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus

tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Mendasarkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud diatas, maka urutan sampai Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagaimana dalam tabel matriks berikut:



## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

| <b>Visi RPJMD</b>  | <b>: MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERTA</b>   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>Misi Ke-5 RPJMD</b>   | <b>: Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik</b>  |                                       |  |
| <b>Tujuan Ke-2</b>   | <b>: Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang</b> |                                       |  |
| <b>Sasaran Ke-3</b>  | <b>: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>    |                                       |  |
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>                       | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| 1. <i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</i> | Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah  | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Mutu Pengelola Pajak</li> <li>- Penyempurnaan administrasi Pajak Daerah</li> <li>- Penyempurnaan Regulasi Pajak Daerah</li> </ul> |
| 2. <i>Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah</i>  | Meningkatnya penerimaan pajak daerah  |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Objek Pajak Daerah</li> <li>- Pendataan Wajib Pajak</li> <li>- Penyempurnaan Tarif Pajak</li> </ul>                                 |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Minahasa yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendapatan Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah. Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam program tahun 2019 – 2023 ini berupa :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 1.2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
  - 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.5.6 Penyediaan Bahan/Material
  - 1.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
    - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.6.2 Pengadaan Mebel
    - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
    - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
    - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program ini adalah program teknis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah . Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2022 yang meliputi :
- 2.1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
    - 2.1.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
    - 2.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
    - 2.1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
    - 2.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
    - 2.1.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

- 2.1.6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 2.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 2.1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 2.1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 2.1.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 2.1.11 Penagihan Pajak Daerah
- 2.1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 2.1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Perubahan Rencana program dan kegiatan tahun 2019 - 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

| Tujuan   | Sasaran   | Kode            | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan(output)  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi         |      |
|--|---|-----------------|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------------|------|
|  |   |                 |  |  |  | Tahun 2019                                    |                       | Tahun 2020            |                       | Tahun 2021            |                       | Tahun 2022            |                       | Tahun 2023            |                       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |  |                |      |
|  |   |                 |  |  |  | Target  | Rp                    | Target                | Rp                    | Target                | Rp                    | Target                | Rp                    | Target                | Rp                    | Target  |  |                | Rp   |
| (1)  | (2)   | (4)             | (5)  | (6)  | (7)                                      | (8)   | (9)                   | (10)                  | (11)                  | (12)                  | (13)                  | (14)                  | (15)                  | (16)                  | (17)                  | (18)  | (19)   | (20)           | (21) |
| <b>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b> |   |                 |  | <b>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja</b>  | <b>C</b>                                 | <b>C</b>                                      |                       | <b>CC</b>             |                       | <b>B</b>              |                       | <b>BB</b>             |                       | <b>BB</b>             |                       | <b>BB</b>   |  |                |      |
|  | <b>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah</b> |                 |  | <b>Nilai IKM Perangkat Daerah</b>  | <b>3</b>                                 | <b>3</b>                                      |                       | <b>3</b>              |                       | <b>3</b>              |                       | <b>4</b>              |                       | <b>4</b>              |                       | <b>4</b>  |  |                |      |
|  |   | 5               | URUSAN PENUNJANG   |  |  |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |  |                |      |
|  |   | <b>5.02</b>     | URUSAN PENUNJANG KEUANGAN  |  |  | <b>16.384.225.000</b>                         |                       | <b>14.973.080.000</b> |                       | <b>17.578.834.952</b> |                       | <b>17.055.795.389</b> |                       | <b>17.396.911.297</b> |                       | <b>83.388.846.638</b>                                       |  |                |      |
|  |   | 5.02.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah</b>   | <b>80%</b>                               | <b>80%</b>                                    | <b>12.261.125.000</b> | <b>85%</b>            | <b>11.994.227.000</b> | <b>87%</b>            | <b>15.407.924.323</b> | <b>Baik</b>           | <b>14.983.795.389</b> | <b>Baik</b>           | <b>15.122.911.297</b> | <b>Baik</b>   | <b>69.769.983.009</b>                        | <b>Bapenda</b> |      |
|  |   | 5.02.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1. Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Ditetapkan Dengan Perbub<br>2. Persentase dokumen penganggaran yang ditetapkan/disahkan<br>3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan/disahkan |  |   |                       |                       |                       | <u>100%</u>           | <u>2.295.348</u>      | -                     | -                     | 100%                  | <u>5.000.000</u>      |   |  |                |      |
|  |   | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |   |                       |                       |                       | 3 Dok                 | 2.295.348             | 2 Dok                 | -                     | 2 dok                 | 5.000.000             |   |  |                |      |

|  |  |                 |   |   |  |  |  |  |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |  |  | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               |  |  |  |  |  |
|  |  |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |  |  |  |  | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               |  |  |  |  |  |
|  |  |                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |  |  |  |  | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               |  |  |  |  |  |
|  |  |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  |  |  |  |  | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               | 1 Dok         |               |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |  |  |  |  | 1 Lap         |               | 1 Lap         | -             | 1 Lap         |               |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat   |  |  |  |  |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 1. <i>Persentase pegawai/ ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</i><br><br>2. <i>Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/ disahkan dan didistribusikan</i> |  |  |  |  | 100%          | 3.934.788.216 | 100%          | 3.933.835.000 | 100%          | 4.032.180.875 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |  |  | 26 Org        | 3.933.835.000 | 26 org        | 3.933.835.000 | 26 org        | 4.032.180.875 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |  |  |  |  | ≥120 SPP/S PM |               | ≥120 SPP/S PM |               | ≥120 SPP/S PM |               |  |  |  |  |  |

|  |  |                 |   |  |  |  |  |  |         |             |         |             |         |             |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|--|--|--|
|  |  | 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               |  |  |  |  | 1 Dok   | 953.216     | 1 Dok   |             | 1 Dok   |             |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  |  |  |  | 17 Dok  |             | 17 Dok  |             | 17 Dok  |             |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |  |  |  |  | 1 Dok   |             | 1 Dok   |             | 1 Dok   |             |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan  |  |  |  |  |         |             |         |             |         |             |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.03001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |  |  |  |  |         |             |         |             |         |             |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |  |  |  |  |         |             |         |             |         |             |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | 1. Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja<br>2. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian                      |  |  |  |  | 95%     |             | 95%     | 56.800.000  | 95%     | 58.000.000  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                             | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  |  |  |  |  |         |             |         |             |         |             |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |  |  |  |  |         |             | 70 Psg  | 56.800.000  | 70 Psg  | 58.000.000  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi  |  |  |  |  | 87%     | 252.605.479 | 90%     | 257.012.000 | 90%     | 267.700.000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi  |  |  |  |  | 6 Jenis | 10.465.290  | 7 Jenis | 8.500.000   | 7 Jenis | 9.100.000   |  |  |  |  |



|  |  |                 |   |   |  |  |  |  |   |                    |   |                   |   |                   |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|---|---|--|--|--|--|---|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--|--|--|
|  |  |                 |   | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                  |  |  |  |  |   |                    |   |                   |   |                   |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |  |  |  |  | 40 Jenis                                      | 78.686.170         | 40 jenis                                      | 71.712.000        | 40 jenis                                      | 74.000.000        |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |  |  |  |  |   |                    | 10 jenis                                      | 6.000.000         | 10 jenis                                      | 6.200.000         |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |  |  |  |  | 800 Lbr<br>16000<br>0 Lembar                  | 39.514.019         | 800 lbr<br>130.000 lembar                     | 35.000.000        | 800 lbr<br>140.000 lembar                     | 36.000.000        |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan        |  |  |  |  | 1440 Eksem                                    | 7.200.000          | 1440 eksemplar                                | 7.200.000         | 1440 eksemplar                                | 7.600.000         |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   |  |  |  |  |   |                    |   |                   |   |                   |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |  |  |  | 12 bln  | 4.000.000          | 200 orang                                     | 4.600.000         | 200 orang                                     | 4.800.000         |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |  |  |  |  | 20 Laporan<br><br>150 Laporan<br><br>12 bulan | 112.740.000        | 20 Laporan<br><br>150 Laporan<br><br>12 bulan | 124.000.000       | 20 Laporan<br><br>150 Laporan<br><br>12 bulan | 130.000.000       |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemda sesuai RKBM SKPD          |  |  |  |  | 87%   | <u>398.119.300</u> | 90%   | <u>40.000.000</u> | 90%   | <u>45.000.000</u> |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |  |  |  |  |   |                    |   |                   |   |                   |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |  |  |  |  |   |                    |   |                   |   |                   |  |  |  |  |

|  |  |                 |   |  |  |  |  |  |          |                |          |                |          |                |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|--|--|--|
|  |  | 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |  |  |  |  | 10 unit  | 398.119.300    | 4 unit   | 40.000.000     | 5 unit   | 45.000.000     |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Tingkat Operasionalisasi Jasa Perkantoran Tahunan   |  |  |  |  | 87%      | 10.591.977.980 |          | 10.591.978.389 |          | 10.603.530.422 |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |  |  | 440 buah | 4.400.000      | 440 buah | 4.400.000      | 440 buah | 4.400.000      |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |  |  |  |  | 12 bulan | 10.520.377.980 | 12 bulan | 10.520.378.389 | 12 bulan | 10.531.930.422 |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |  |  |  |  |          |                |          |                |          |                |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  |  |  |  | 2 orang  | 67.200.000     | 2 orang  | 67.200.000     | 2 orang  | 67.200.000     |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi   |  |  |  |  |          | 228.138.000    | 90%      | 104.170.000    | 90%      | 111.500.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  |  |  |  | 27 unit  | 94.670.000     | 27 unit  | 94.670.000     | 27 unit  | 102.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  |  |  |  | 14 unit  | 9.500.000      | 8 unit   | 9.500.000      | 8 unit   | 9.500.000      |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |  |  |  |  | 1 paket  | 123.968.000    |          |                |          |                |  |  |  |  |

| 2. Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah |                                      |                 |   | Prosentase Peningkatan Pajak Daerah  | 12%             | 11%                                       |               | 2%                                       |               | 2.5%                                      |               | 3%  |               | 3.5%                                      |                  | 22%              |                |         |  |
|--|--------------------------------------|-----------------|---|--|-----------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|------------------|------------------|----------------|---------|--|
|  | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah |                 |   | 1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah   | 100%            | 100 %                                     |               | 100%                                     |               | 100 %                                     |               | 100 %                                     |               | 100 %                                     |                  | 100 %            |                |         |  |
|  |                                      |                 |   | 2. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD  | ≥0              | ≥0  |               | ≥0                                       |               | ≥0  |               | ≥0  |               | ≥0  |                  | ≥0               |                |         |  |
|  |                                      | 5.02.04         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | Prosentase Capaian Realisasi PAD dari sector Pajak Daerah<br><br>Prosentase Peningkatan Pajak Daerah   | 100%<br><br>12% | 100 %<br><br>11%                          | 4.123.100.000 | 96%<br><br>2%                            | 2.978.853.000 | 100 %<br><br>2.5%                         | 2.170.910.629 | 100 %<br><br>3%                           | 2.072.000.000 | 100 %<br><br>3.5%                         | 2.274.000.000    | 100 %<br><br>22% | 13.618.863.629 | Bapenda |  |
|  |                                      | 5.02.04.2.01    | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah  | 1. Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB<br>2. Jumlah Wajib Pajak Daerah<br>3. Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya<br>4. Jumlah Dokumen/Laporan Pajak dan Retribusi Daerah |                 | 101%<br><br>≥200<br><br>100%<br><br>4 Dok |               | 126%<br><br>≥200<br><br>91%<br><br>4 Dok |               | 100%<br><br>≥200<br><br>100%<br><br>4 Dok | 2.170.910.629 | 100%<br><br>≥200<br><br>100%<br><br>4 Dok | 2.072.000.000 | 100%<br><br>≥200<br><br>100%<br><br>4 Dok | 2.274.000.000    |                  |                |         |  |
|  |                                      | 5.02.04.2.01.01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah  |                 |   |               |  |               |   |               |   |               |   | 20.000.000       |                  |                |         |  |
|  |                                      | 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah  |                 |   |               |  |               | 10 dok                                    | 66.599.336    |   |               |   | 10 Dok           | 50.000.000       |                |         |  |
|  |                                      | 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  |                 |   |               |  |               | 1 Laporan                                 | 65.263.583    |   | 64.000.000    |   | 1 Laporan        | 65.000.000       |                |         |  |
|  |                                      | 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah   |                 |   |               |  |               | 10 jenis cetakan                          | 190.723.500   |   | 192.000.000   |   | 10 jenis cetakan | 198.000.000      |                |         |  |

|  |  |                 |   |  |  |  |  |  |                   |               |                       |               |                       |               |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|
|  |  | 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |  |  |  |  | ≥50 wp            | 63.605.572    | ≥50 WP                | 58.000.000    | ≥50 WP                | 60.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   |  |  |  |  |                   |               |                       |               | 10 laporan            | 25.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya   |  |  |  |  | 2 Lap<br>47 orang | 1.545.257.170 | 2 Laporan<br>47 orang | 1.546.000.000 | 2 Laporan<br>47 orang | 1.576.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah  |  |  |  |  | 8 jenis WP        | 59.734.306    | ≥200 WP               | 50.000.000    | ≥200 WP               | 52.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah   |  |  |  |  |                   |               |                       |               | ≥50 WP                | 20.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      |  |  |  |  | 10 laporan        | 25.089.434    | 10 Laporan            | 20.000.000    | 10 Laporan            | 22.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  |  |  |  |  | 8 jenis WP        | 89.346.840    | ≥200 WP               | 85.000.000    | ≥200 WP               | 87.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   |  |  |  |  |                   |               |                       |               | ≥15 WP                | 20.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                             |  |  |  |  | 10 laporan        | 65.290.888    | 10 Laporan            | 57.000.000    | 10 Laporan            | 59.000.000    |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                             |  |  |  |  |                   |               |                       |               | 3 Jenis RD            | 20.000.000    |  |  |  |  |

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator Tujuan dan Sasaran  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                                      |
| 1   | <b>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja</b>                                 | C                                       | CC                          | B    | BB   | BB   | BB   | BB                                       |
|     | Nilai IKM Perangkat Daerah  | 3                                       | 3                           | 3    | 3    | 4    | 4    | 4  |
| 2   | <b>Prosentase Peningkatan Pajak Daerah</b>                                  | 12%                                     | 11%                         | 2%   | 2,5% | 3%   | 3.5% | 22%                                      |
|     | 1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah                                | 100%                                    | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
|     | 2. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD | ≥0                                      | ≥0                          | ≥0   | ≥0   | ≥0   | ≥0   | ≥0                                       |

Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang PBB-P2 dan BPHTB)

| No. | Indikator                           | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|-------------------------------------|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|     |                                     | 2018                                    | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| (1) | (2)                                 | (3)                                     | (4)                         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                                      |
| 1   | Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB | 100%                                    | 100%                        | 100  | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |

Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)

| No. | Indikator                 | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |                           | 2018                                    | 2019                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |  |
| (1) | (2)                       | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Wajib Pajak Daerah | ≥200 WP                                 | ≥200 WP                     | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥1000 WP                                 |

Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang Penagihan)

| No. | Indikator                               | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| (1) | (2)                                     | (3)                                     | (4)                         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                                      |
| 1   | Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya | 105%                                    | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |

Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang Pengawasan dan Pelaporan)

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen/Laporan Pajak dan Retribusi Daerah | 4 Dok                                   | 4 Dok                       | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok | 10 Dok                                   |

Indikator Kinerja Eselon III  
(Sekretaris)

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                                      |
| 1   | Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perbup  | 100%                                    | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
| 2   | Persentase dokumen penganggaran yang disahkan/ ditetapkan   | 100%                                    | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
| 3   | Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan/ disahkan   | 100%                                    | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
| 4   | Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | 100%                                    | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
| 5   | Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/ disahkan dan didistribusikan                         | 100%                                    | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |

|   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja                        | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  |
| 7 | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi          | 85%  | 87%  | 90%  | 90%  | 90%  | 92%  | 92%  |
| 9 | Persentase Pemenuhan BMD penunjang urusan Pemdases uai RKBMD SKPD    | 85%  | 87%  | 90%  | 90%  | 90%  | 92%  | 92%  |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB)

| No. | Indikator                                    | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |  | 2018                                    | 2019                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | ≥200 WP                                 | ≥200 WP                     | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥1000 WP                                 |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Pengolahan Data dan Informasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB)

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|     |  | 2018                                    | 2019                        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | ≥120.000 WP                             | ≥120.000 WP                 | ≥120.000 WP | ≥120.000 WP | ≥120.000 WP | ≥120.000 WP | ≥120.000 WP                              |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Penagihan Bidang PBB-P2 dan BPHTB)

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Lap                                   | 1 Lap                       | 1 Lap     | 1 Lap     | 1 Lap     | 1 Lap     | 5 Laporan                                |
| 2   | Jumlah Piutang PBB-P2 yang tertagih   | ≥200 Juta                               | ≥200 Juta                   | ≥200 Juta | ≥200 Juta | ≥200 Juta | ≥200 Juta | ≥1 Milyar                                |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|     |  | 2018                                    | 2019                        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | ≥50 Lap WP                              | ≥50 Lap WP                  | ≥50 Lap WP | ≥50 Lap WP | ≥50 Lap WP | ≥50 Lap WP | ≥250 Lap WP                              |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Pengolahan Data Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)

| No. | Indikator                                   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Pengolahan Data Pajak Daerah | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok.  | 5 Dok                                    |
| 2   | Jumlah Dokumen Buku Induk Wajib Pajak       | 8 Dok                                   | 8 Dok                       | 8 Dok   | 8 Dok   | 8 Dok   | 8 Dok   | 40 Dok                                   |
| 3   | Jumlah Data NPWPD                           | ≥200 WP                                 | ≥200 WP                     | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥1000 WP                                 |



Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Penetapan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Sistem Dan Prosedur Penetapan Pajak Daerah | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok.  | 5 Dok                                    |
| 2   | Jumlah Nota Perhitungan                                   | ≥200 WP                                 | ≥200 WP                     | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥1000 WP                                 |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Penagihan Pajak Daerah Lainnya Pada Bidang Penagihan)

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |  | 2018                                    | 2019                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Prosedur Penagihan Pajak Daerah Lainnya | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok.  | 5 Dok                                    |
| 2   | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih                        | ≥200 WP                                 | ≥200 WP                     | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥200 WP | ≥1000 WP                                 |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Pendapatan Retribusi Daerah Pada Bidang Penagihan)

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)    | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Penagihan Retribusi Daerah | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok. | 5 Dok                                    |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Keberatan Dan Pengaduan Pada Bidang Penagihan)

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)    | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Sistem Dan Prosedur Keberatan dan Banding  | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok. | 5 Dok                                    |
| 2   | Jumlah Dokumen yang mendukung seksi keberatan dan banding | 2 Dok                                   | 2 Dok                       | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok  | 10 Dok                                   |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)

| No. | Indikator             | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--|
|     |                       | 2018                                    | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   |  |
| (1) | (2)                   | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)    | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen PBB-P2 | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok. | 5 Dok                                    |
| 2   | Jumlah Dokumen BPHTB  | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok. | 5 Dok                                    |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Pelaporan Pajak Daerah Lainnya Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)

| No. | Indikator                                   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Laporan Pajak Daerah Lainnya | 8 Dok                                   | 8 Dok                       | 8 Dok | 8 Dok | 8 Dok | 8 Dok | 40 Dok                                   |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasie Pelaporan Retribusi Daerah Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)

| No. | Indikator                       | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |                                 | 2018                                    | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |  |
| (1) | (2)                             | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Retribusi Daerah | 8 Dok                                   | 8 Dok                       | 8 Dok | 8 Dok | 8 Dok | 8 Dok | 40 Dok                                   |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasubbag Kepegawaian Sekretariat)

| No. | Indikator                               | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|     |   | 2018                                    | 2019                        | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |  |
| (1) | (2)                                     | (3)                                     | (4)                         | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | 27 Dok                                  | 27 Dok                      | 27 Dok | 27 Dok | 27 Dok | 27 Dok | 135 Dok                                  |
| 2   | Tingkat Disiplin Pegawai                | ≥95%                                    | ≥95%                        | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%                                     |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasubbag Umum dan Perlengkapan Sekretariat)

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                |                |                |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|     |  | 2018                                    | 2019                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)            | (6)            | (7)            | (8)            | (9)                                      |
| 1   | Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan | 6 Jenis                                 | 6 Jenis                     | 6 Jenis        | 6 Jenis        | 7 Jenis        | 7 Jenis        | 32 Jenis                                 |
| 2   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | 40 Jenis                                | 40 Jenis                    | 40 Jenis       | 40 Jenis       | 40 Jenis       | 40 Jenis       | 40 Jenis                                 |
| 3   | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan                                | 6 Jenis                                 | 6 Jenis                     | 8 Jenis        | 8 Jenis        | 10 Jenis       | 10 Jenis       | 42 Jenis                                 |
| 4   | Jumlah cetakan   | 600 Lbr                                 | 600 Lbr                     | 700 Lbr        | 800 Lbr        | 800 Lbr        | 800 Lbr        | 3700 Lbr                                 |
| 5   | Jumlah penggandaan   | 100.000 Lembar                          | 110.000 Lembar              | 120.000 Lembar | 160.000 Lembar | 130.000 Lembar | 140.000 Lembar | 660.000 Lbr                              |
| 6   | Jumlah surat kabar yang diadakan   | 1440 Eksemplar                          | 1440 Eksemplar              | 1440 Eksemplar | 1440 Eksemplar | 1440 Eksemplar | 1440 Eksemplar | 7200 Eksemplar                           |
| 7   | Jumlah tamu yang terfasilitasi   | 200 Orang                               | 200 Orang                   | 200 Orang      | 200 Orang      | 200 Orang      | 200 Orang      | 1000 orang                               |
| 8   | Jumlah laporan/ berita acara hasil koordinasi dalam daerah                   | 150 Laporan                             | 150 Lap                     | 150 Lap        | 150 Lap        | 150 Lap        | 150 Lap        | 750 Lap                                  |
| 9   | Jumlah laporan/ berita acara hasil koordinasi luar daerah                    | 20 Laporan                              | 20 Lap                      | 20 Lap         | 20 Lap         | 20 Lap         | 20 Lap         | 100 Lap                                  |
| 10  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan                             | 12 Unit                                 | 8 Unit                      | 10 Unit        | 10 Unit        | 4 unit         | 5 Unit         | 37 Unit                                  |

|    |  |          |          |          |          |          |          |           |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 11 | Jumlah materai tersedia  | 440 buah | 440 buah | 440 buah | 440 buah | 440 buah | 440 buah | 2200 Buah |
| 12 | Jumlah bulan operational Jasa Komunikasi/Telepon/Fax/Internet/listrik/air tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 Bulan  |
| 13 | Jumlah Sopil/Waker yang tersedia   | 2 Orang  | 2 Orang  | 2 Orang  | 2 Orang  | 2 Orang  | 2 Orang  | 2 Orang   |
| 14 | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara   | 19 Unit  | 27       | 27 Unit  | 27 Unit  | 27 Unit  | 27 Unit  | 27 Unit   |
| 15 | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                 | 8 Unit   | 8 Unit   | 8 Unit   | 14 Unit  | 8 Unit   | 8 Unit   | 46 Unit   |
| 16 | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara                          | 1 Unit   | 1 Unit   | 1 Unit   | 1 Unit   | 1 Unit   | 1 Unit   | 1 Unit    |

Indikator Kinerja Eselon IV  
(Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat)

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |  | 2018                                    | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                                      |
| 1   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat   | 2 Dok                                   | 2 Dok                       | 2 Dok | 3 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 11 Dok                                   |
| 2   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 5 Dok                                    |
| 3   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 5 Dok                                    |
| 4   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 5 Dok                                    |
| 5   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                               | 1 Dok                                   | 1 Dok                       | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 5 Dok                                    |
| 6   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | 1 Lap                                   | 1 Lap                       | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 5 Lap                                    |

|    |   |              |              |              |              |              |              |              |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |              |              |              |              |              |              |              |
| 7  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 26 Orang     | 26 Orang     | 26 Orang     | 26 Orang     | 26 Orang     | 26 Orang     | 26 Orang     |
| 8  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | ≥120 SPP/SPM | ≥120 SPP/SPM | ≥120 SPP/SPM | ≥120 SPP/SPM | ≥120 SPP/SPM | ≥120 SPP/SPM | ≥600 SPP/SPM |
| 9  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Lap        | 1 Lap        | 1 Lap        | 1 Lap        | 1 Lap        | 1 Lap        | 5 Lap        |
| 10 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 Lap       | 17 Lap       | 17 Lap       | 17 Lap       | 17 Lap       | 17 Lap       | 85 Lap       |
| 11 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | 1 Dok        | 1 Dok        | 1 Dok        | 1 Dok        | 1 Dok        | 1 Dok        | 5 Dok        |

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Pola penjabaran Renstra dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses.

Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD tahun 2018-2023 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Minahasa. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa serta rencana-rencana kerja Bidang dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

Melalui forum Perangkat Daerah (PD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala PD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Perubahan Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Minahasa kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian, Amin.

Tondano, 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,**



**Dra. MARTHA M. AGUW**

Pembina Tkt. I IV/b

NIP. 196805011997032009



### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

